

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005— 2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam proses pemberian hak yang diberikan oleh negara guna mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan minat dan bakat masyarakat sesuai dengan potensinya dengan merujuk pada Pasal 28C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pendidikan merupakan salah satu pemberi harapan bagi bangsa untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar mampu menjadi masyarakat yang berdaya dalam mengelola lingkungan sekitarnya yang ada (Kamarubiani *et al.*, 2020). Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah dengan wewenangnya perlu melindungi anak bangsa dengan cara memberikan pendidikan yang ramah bagi anak.

Wujud lingkungan pendidikan ramah anak memiliki tujuan untuk menghindari anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang dapat menginvansi hak asasi manusia. Kegiatan pemerintah untuk memenuhi hak anak salah satunya dengan pendidikan terbukti dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Menurut PERMEN PPA No. 8 Tahun 2014 Sekolah Ramah Anak atau SRA merupakan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi,

dan perlakuan salah lainnya serta mendukung, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Sekolah Ramah Anak merupakan sekolah non diskriminatif, aman, nyaman, terbuka dan mampu melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan dan kehidupan sosial, untuk mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan pada anak (Syafi'i, 2017).

Melihat pada definisi sekolah ramah anak bahwa sekolah wajib menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak maka konsep sekolah ramah anak terbuat dari hal-hal yang biasanya mengganggu keamanan dan kenyamanan anak. Adanya sekolah ramah anak didasarkan pada keadaan secara nyata bahwa masih banyak anak yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal (PAI, 2020). Keadaan rentan ini dipengaruhi oleh dampak yang ditimbulkan dari orang dewasa yang ada disekitarnya untuk berkembang dan bertahan hidup (Gheaus, 2017). Adanya dampak dari orang dewasa yang berperan penting bagi perkembangan dan ketahanan hidup anak, menyebabkan anak rawan menjadi korban kekerasan. Kemen PPPA (2018) melakukan survei bahwa sebanyak 62 persen anak laki-laki setidaknya mengalami satu bentuk kekerasan, selain itu satu dari 17 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Sementara pada anak perempuan sebesar 50 % dari anak laki-laki mengalami kekerasan berbentuk kekerasan emosional. Keadaan rentan tersebut merupakan keadaan rawan yang bisa dilakukan oleh orang dewasa di berbagai lingkungan. Selain itu keadaan rentan anak tidak hanya ditemui pada tindak kekerasan yang dialami, perampasan hak anak untuk tidak melanjutkan sekolah, anak sebagai pekerja, dan lain sebagainya.

Adanya kerentanan anak menjadi fokus utama setiap negara untuk melindungi hak-hak anak. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu bentuk perlindungan negara pada anak dalam satuan pendidikan supaya anak dapat merasa aman dan nyaman tanpa diskriminasi dari staf, pengajar, dan teman sebaya untuk mendukung partisipasi anak secara aktif dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Menurut Kemen PPPA Sekolah ramah anak berdiri dibangun dan dibentuk berdasarkan lima prinsip, yaitu (1) Nondiskriminasi (2) kepentingan terbaik bagi anak bahwa kebutuhan anak menjadi sumber

pertimbangan utama dalam keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. (3) Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. (4) Menghormati pandangan anak. (5) pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akutabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Lima prinsip tersebut dapat dicapai dengan adanya enam komponen sekolah ramah anak. Menurut Yosada dan Yuniarti (2019) enam komponen sekolah ramah anak yang perlu dilaksanakan adalah (1) adanya komitmen tertulis sebagai kebijakan sebagai pengakuan atau perjanjian bahwa sekolah ramah anak memiliki komitmen penuh dari setiap pihak. (2) pelaksanaan proses pembelajaran ramah anak. (3) guru dan personel yang terlatih tentang hak-hak anak. (4) Sarana dan Prasarana Ramah Anak. (5) Partisipasi anak-anak /“*peer educator*”. (6) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Selain itu orang tua juga terlibat dalam penataan lingkungan, pembenahan sarana, berkoneksi dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, dengan alumni. Lalu orang tua menjadi narasumber di sekolah. Sesuai dengan lima prinsip sekolah ramah anak pengajar dan staf sekolah diharuskan untuk mendapatkan pelatihan terkait dengan hak-hak anak dimana pengajar dan staf mampu memberikan pemahaman pada anak, orang tua, dan wali terkait bagaimana pentingnya perlindungan bagi anak terutama pada anak dengan perlindungan khusus. Dalam kegiatannya untuk memberikan pemahaman pada anak maka salah satu cara yang efektif adalah dengan memberi pendekatan pembelajaran yang dapat merangsang anak untuk belajar secara kooperatif dan cenderung memberikan interaksi (Sulistiono *et al.*, 2014).

Prinsip sekolah ramah anak dapat diwujudkan pada pendidikan nonformal, salah satunya di satuan pendidikan nonformal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal yang berkonsep terbuka pada siapa saja dan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak. PKBM pun tidak jarang banyak diikuti oleh usia anak hingga remaja, hal ini disebabkan oleh banyaknya anak yang rawan melanjutkan pendidikan atau parahnya putus sekolah. Angka

putus sekolah dilansir oleh Kemen PPPA pada tahun 2019 dan 2020 sekitar 1,76 persen pada jenjang Sekolah Menengah Atas, lalu 1,07 persen pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan 0,37 pada jenjang Sekolah Dasar. Selain karena banyaknya angka anak putus sekolah, pembangunan PKBM juga dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan karena lokasi yang jauh dari perkotaan, tingkat buta aksara tinggi, pergaulan tidak terkontrol, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, masyarakat kurang mampu (Luciana, Winoto, Anwar, 2019). Anak yang tidak mampu untuk bersekolah lebih tertarik pada PKBM dikarenakan kemampuan PKBM dalam memberikan fasilitas belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Selain itu PKBM menjadi tempat untuk bertukar keterampilan dan pengalaman yang dimiliki untuk saling memberi pengetahuan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Adanya PKBM merupakan pemberian peluang pada anak yang kurang beruntung dalam melanjutkan sekolah untuk dapat selalu belajar selama masih ada di dunia ini (Sulistiono *et. al.*, 2021).

Faktor penghambat pendidikan khususnya pada anak timbul dari segi keluarga tidak sedikit keluarga yang memiliki hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, tidak harmonisnya suatu keluarga menyebabkan perbedaan sikap dan wujud relasi dari antar anggota keluarga, sehingga relasi yang terwujud di lingkungan keluarga menimbulkan kebencian, sikap yang terlalu keras, dan sikap yang acuh tak acuh (Slameto, 2010). Kedua faktor dari lingkungan sekolah, menurut data KPAI (2013-2015) 10% kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran terhadap anak banyak ditemukan berupa pelecehan (*bullying*), serta bentuk hukuman yang menyakiti peserta didik seperti mencubit (504 Kasus), membentak dengan suara tinggi dan keras (357 kasus), dan menjewer (379 Kasus).

Selain kasus kekerasan pada anak sekolah pun masih belum memiliki sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, selain itu sekolah masih memiliki suasana yang mengancam untuk anak baik ancaman dari teman sebaya hingga guru. Ketiga adalah faktor lingkungan masyarakat dimana kehidupan masyarakat disekitar dapat berpengaruh pada motivasi belajar karena kehidupan

masyarakat yang berisikan orang-orang yang tidak terpelajar, menjadi penjudi, suka mencuri, akan memberikan pengaruh yang buruk pada anak (Slameto, 2010).

Keempat, faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang dapat menyebabkan anak putus sekolah dan tereksplorasi (Putro, 2016), ekonomi yang rendah menyebabkan anak harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga anak lupa akan kewajibannya untuk fokus mengenyam pendidikan dan malah menjadi pekerja anak. Kelima, merupakan faktor minat, dimana faktor ini adalah faktor internal dari anak yang memang terpengaruh oleh orang tua dan lingkungan masyarakat, karena biasanya orang tua dan masyarakat memang tidak memberikan motivasi bagi anak untuk melanjutkan sekolah dan orang tua cenderung tidak ingin menyekolahkan anaknya. Berdasarkan pada data terkait angka putus sekolah, angka tidak bersekolah, angka belum bersekolah hingga angka kekerasan di sekolah dan faktor-faktor penghambat pendidikan maka PKBM menyediakan program pendidikan non-formal yang dibangun oleh masyarakat untuk kaum termarjinalkan (misalnya orang putus sekolah, orang yang tidak mampu bersekolah, orang yang pernah dipenjara, dll) agar mereka dapat memiliki kesejahteraan dengan memiliki keterampilan sesuai minat dan bakat yang dapat dikembangkan agar menjadi masyarakat yang lebih berdaya (Rahma et., al, 2019). Salah satu program yang dikembangkan di PKBM Kabupaten Bandung Barat yaitu bergerak di bidang pendidikan terutama pada pendidikan kesetaraan.

Melihat pada fungsi PKBM dan melihat pada tujuan dari program Sekolah Ramah Anak, sebenarnya PKBM merupakan salah satu tempat pendidikan yang sudah mampu menerapkan konsep sekolah ramah anak dalam proses pembelajarannya. PKBM merupakan tempat belajar dimana setiap jenjang usia diterima didalamnya tanpa melihat pada latar belakangnya terutama pada pendidikan kesetaraan, sehingga pengajar dan staf PKBM harus mampu menyesuaikan konsep belajar dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki dari partisipan terutama pada anak sehingga mengharuskan pengajar untuk mampu mengkaji dan menghasilkan generalisasi, serta konsep dan teori belajar untuk menumbuhkan kemandirian dengan proses *learning by doing* atau pemberdayaan dan pelatihan pada anak (Kamarubiani&Atmaja, 2009). Selain itu

Sri Ratnasari, 2021

PENDEKATAN COMMUNITY RELATION UNTUK MENYIAPKAN PKBM RAMAH ANAK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

PKBM juga berfungsi sebagai tempat yang memang dapat menciptakan keaktifan pada anak agar berpartisipasi secara aktif dan kolaboratif (Sekar&Kamarubiani, 2020).

PKBM merupakan kegiatan yang dibangun oleh teori *community relation* dimana sekelompok orang yang memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama dalam suatu tempat dan pemerintah yang sama (Moore, 2004). Menurut Jerold *community relations* adalah suatu peningkatan partisipasi dan posisi organisasi dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas dengan menggunakan pendekatan spesifik untuk menyampaikan sebuah informasi yang dibantu dengan kegiatan yang mendukung (Sulistiono&Biru, 2020). PKBM yang ada karena pengaruh *community relations* dibentuk dari kerjasama yang dilakukan oleh suatu komunitas dengan kemitraan yaitu dengan proses dialog dan diskusi untuk membangun relasi, lalu dengan mengembangkan masyarakat dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan komunitas.

Melihat pada teori bahwa adanya pendidikan untuk menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan terutama memberikan lingkungan pendidikan yang jauh dari diskriminasi dan kekerasan pada anak nyatanya belum penuh dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan data keadaan anak di Kabupaten Bandung Barat yang ternyata tidak mengindikasikan keberhasilan dari Undang-Undang dan Peraturan terkait untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena angka kemiskinan pada Kabupaten Bandung Barat di tahun 2016 mencapai angka 11,71% (KBB dalam angka 2017) sehingga angka kemiskinan yang ada berpengaruh pada angka putus sekolah pada anak karena banyak orang tua yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Angka putus sekolah pada tahun 2016 di Kabupaten Bandung Barat pada tingkat Sekolah Dasar sebesar 71,19 persen, lalu pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 32,31% persen, dan pada jenjang Sekolah Menengah Atas 29,67 persen, selain itu tingkat banyaknya anak yang tidak bersekolah sebesar 66,59 persen (KAKKMM, 2018) dan pada tahun 2018 tercatat sekitar 1.287 orang anak di Kabupaten Bandung Barat merupakan anak putus sekolah (Badan Pusat Statistik, 2018). Maka berdasarkan pada karakteristik

PKBM dan tujuan Sekolah Ramah Anak yaitu untuk meningkatkan partisipasi

Sri Ratnasari, 2021
PENDEKATAN COMMUNITY RELATION UNTUK MENYIAPKAN PKBM RAMAH ANAK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

peserta didik, perlu adanya kajian mengenai implementasi pendekatan *community relation* pada penerapan sekolah ramah anak pada program kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bandung Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu

1. Tingginya angka putus sekolah
2. Lokasi lembaga pendidikan yang jauh
3. Kurang harmonisnya lingkungan keluarga anak
4. Masih banyaknya perilaku KDRT
5. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
6. Kondisi ekonomi yang masih rendah

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan yang akan diteliti yaitu

1. Bagaimana proses persiapan PKBM ramah anak di Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana pendekatan *community relation* pada PKBM ramah anak di Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk

1. Mendeskripsikan penerapan Sekolah Ramah anak di PKBM Kabupaten Bandung Barat.
2. Mendeskripsikan pendekatan lembaga PKBM melalui *Community Relation* menuju Sekolah Ramah Anak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan dan kajian pengembangan ilmu Pendidikan Masyarakat mengenai implementasi pendekatan *community relation* untuk menuju PKBM ramah anak di Kabupaten Bandung Barat.

2. Manfaat Praktis

Sri Ratnasari, 2021

PENDEKATAN COMMUNITY RELATION UNTUK MENYIAPKAN PKBM RAMAH ANAK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | respotory.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana implementasi pendekatan *community relation* untuk menuju PKBM ramah anak di Kabupaten Bandung Barat.

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana implementasi pendekatan *community relation* untuk menuju PKBM ramah anak di Kabupaten Bandung Barat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan masyarakat tentang implementasi pendekatan *community relation* untuk menuju PKBM ramah anak di Kabupaten Bandung Barat.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan pemerintah untuk membuat kebijakan atau program dalam pendidikan yang lebih memperhatikan lingkungan anak baik dalam sekolah, keluarga, dan lingkup masyarakat

1.6 Struktur Organisasi Tesis

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian. Penulis membagi pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan bersisikan uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis

BAB II Kajian Pustaka merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian atau teori yang melandasi permasalahan dalam penelitian yaitu terdiri dari konsep pendidikan PKBM, konsep *community relation*, sekolah ramah anak.

BAB III Metode Penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural yang meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

Sri Ratnasari, 2021

PENDEKATAN COMMUNITY RELATION UNTUK MENYIAPKAN PKBM RAMAH ANAK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | respotory.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAB IV Temuan dan Pembahasan merupakan pemaparan hasil temuan dan kondisi empirik yang didapat oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Pada pemaparan pembahasan, peneliti akan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab I.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi merupakan simpulan hasil temuan dan pembahasan yang akan dikorelasikan dengan kajian pustaka yang relevan sehingga adanya kesinambungan antara kajian empirik dengan kajian teori. Selain itu juga peneliti memaparkan rekomendasi atau saran baik kepada lembaga terkait maupun peneliti selanjutnya terhadap hasil penelitian.